

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 597/Ilmu Pemerintahan

**LAPORAN PENELITIAN
FUNDAMENTAL**



**POLITIK DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH
(KASUS: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
PENERAPAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA DEPOK)**

**Dra. Siti Aisyah, M.Si
NIDN. 0012066807**

**UNIVERSITAS TERBUKA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL

Judul Penelitian : Politik Penyusunan Anggaran Daerah (Kasus: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penerapan Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Anggaran Daerah pada Pemerintahan Kota Depok)

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Pemerintahan

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Dra. Siti Aisyah, M.Si
b. NIDN : 0012066807
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
e. Nomor HP : 081218270178
f. Alamat surel (e-mail) : aisyah@ut.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Yudith A Frans
b. NIDN : 0016077901
c. Perguruan Tinggi : FISIP-UT

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun

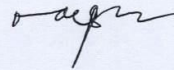
Penelitian Tahun : 2014

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 30.000.000

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 30.000.000

Tangsel, 15 Desember 2014

Ketua Peneliti,



(Dra. Siti Aisyah, M.Si)
NIP. 196806121999032001



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



SURAT PERNYATAAN REVIEWER-1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mani Festati Broto Dra.,M.Ed.

NIP : 196002231986032001

Jabatan : Lektor Kepala

Telah menelaah laporan penelitian

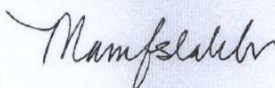
Judul : Peran Persepsi Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Jurusan
Akuntansi UPBJJ-UT Malang Pada Pemilu 2014

Peneliti : Suyatno, SIP.,M.Si

Menyatakan bahwa laporan tersebut layak diterima sebagai laporan Penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang Selatan, Desember 2014
Penelaah,



Mani Festati Broto Dra.,M.Ed.
NIP 196002231986032001

RINGKASAN

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, setiap pejabat publik harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik. Kebijakan pemerintahan yang terkait dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.

Paradigma *government for the people* lebih mengacu kepada substansi (mekanisme politik yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik) artinya dalam setiap pembuatan kebijakan publik, substansi dari kebijakan publik tadi harus berpihak pada kepentingan publik. Salah satu unsur penting kebijakan publik pada pemerintahan daerah adalah penyusunan anggaran daerah. Penyusunan anggaran daerah sebaiknya mengedepankan akuntabilitas publik, karena uang yang dikelola oleh pemerintah pada hakikatnya adalah uang rakyat, sehingga rakyat selayaknya mengetahui pengelolaan anggaran daerah. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas penerapan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah antara lain kualitas kontrol yang dilaksanakan oleh pihak legislatif, kontrol administrasi internal, dan peran media massa dan opini publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas khususnya dalam penyusunan anggaran daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS khususnya Uji Chi Square dan Sommer'd. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kontrol legislatif, kontrol administrasi internal dan peran media massa dan opini publik terhadap kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.

Pada kasus tersebut, teori yang dikemukakan oleh Polidano dapat diterapkan. Untuk memperkuat teori Polidano, perlu memperluas sampel dan uji variabel yang lainnya, seperti fungsi ombusmand, dan partisipasi dan derajat otonomi.

Keywords: politik, penyusunan anggaran, akuntabilitas.

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	1
Halaman Pengesahan	2
Ringkasan	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	7
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Pengertian Akuntabilitas	12
B. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran pada Sektor Publik	17
C. Teori Polidano	19
 BAB III METODE PENELITIAN	 23
A. Hipotesisi	23
B. Variabel dan Instrumen	23
C. Uji Validaitas dan Reabilitas Instrumen	25
D. Populasi dan Sampel	25
E. Metode Pengumpulan Data	25
F. Metode Analisa Data	27
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 29
A. Sebaran Resonden	29
B. Kontrol Legislatif, Kontrol Administrasi, dan Pengaruh Media dan Opini Publik, serta Kualitas Akuntabilitas	31
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas dalam Perumusan Anggaran Daerah di Kota Depok	40
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
 DAFTAR PUSTAKA	 47
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Indikator Akuntabilitas	16
Tabel2	Variabel dan Dimensi	24
Tabel 3	Sebaran Responden	26
Tabel 4	Persepsi Kelompok Pendidikan terhadap Kontrol Legislatif	31
Tabel 5	Tabel Silang Jenis Kelamin dan Kontrol Legislatif	32
Tabel 6	Tabel Silang Usia dan Kontrol Legislatif	33
Tabel 7	Tabel Silang Jenis Kelamin dan Kontrol Administratif Intern	33
Tabel 8	Tabel Silang Usia dan Kontrol Administratif Intern	34
Tabel 9	Persepsi Kontrol administrasi internal berdasarkan kelompok pendidikan	34
Tabel 10	Tabel Silang Peranan dalam Kelmompok dan Kontrol Administratif Intern	35
Tabel 11	Tabel Silang Peranan dalam Kelmompok dan Kontrol Administratif Intern	36
Tabel 12	Tabel Silang Usia dan Peran Media dan Opini Publik	36
Tabel 13	Tabel Silang Tingkat Pendidikan dan Peran Media dan Opini Publik	37
Tabel 14	Tabel Silang Peranan dalam Kelompok dan Peran Media dan Opini Publik	38
Tabel 15	Tabel Silang Jenis Kelamin dan Kualitas Akuntabilitas	38
Tabel 16	Tabel Silang Usia dan Kualitas Akuntabilitas	
Tabel 17	Tabel Silang Tingkat Pendidikan dan Kualitas Akuntabilitas	39
Tabel 18	Tabel Silang Peranan Kelompok dan Kualitas Akuntabilitas	40
Tabel 19	Tabel Silang Kontrol Legislatif dan Kualitas Akuntabilitas	41
Tabel 20	Chi Square Terhadap Variabel Kontrol Legislatif	41
Tabel 21	Uji Sommers'd Terhadap Variabel Kontrol Legislatif	42
Tabel 22	Tabel Silang Kontrol Administratif Internal dan Kualitas Akuntabilitas	42
Tabel 23	Uji Chi Square Kontrol Administratif Internal dan Kualitas Akuntabilitas	43
Tabel 24	Uji Sommers'd terhadap Kontrol Administratif Internal dan Kualitas Akuntabilitas	43
Tabel 25	Tabel Silang Pengaruh Media dan Opini Publik dan dan Kualitas Akuntabilitas	44
Tabel 26	Uji Chi Square terhadap Pengaruh Media dan Opini Publik dan dan Kualitas Akuntabilitas	44
Tabel 27	Uji Sommers'd terhadap Pengaruh Media dan Opini Publik dan dan Kualitas Akuntabilitas	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut setiap pejabat publik harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik. Paradigma baru tersebut lazim disebut sebagai *good governance*. Kebijakan pemerintahan yang terkait dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.

Pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan kepada yang memberi kekuasaan dilakukan agar rakyat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, sekaligus agar rakyat dapat melakukan kontrol atas apa yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Mekanisme pertanggungjawaban tersebut pada hakikatnya sebagai media kontrol rakyat terhadap para politisi pejabat publik. Pertanggungjawaban tersebut merupakan pencerminan apakah para politisi dan birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah berjalan dalam koridor Negara demokratis.

Demokrasi oleh Lincoln dalam Muhadjir (1996 : 181) diartikan sebagai *government of the people, by the people, for the people*. Pengertian ini mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, para penguasa haruslah bertanggung jawab pada rakyat dan memerintah atas nama rakyat. Kekuasaanpun diperoleh melalui kompetisi atau sistem pemilihan yang bebas dan terbuka. *Government of the people dan by the people* lebih mengarah pada demokrasi proses atau prosedur (mekanisme politik yang demokratis, artinya dalam setiap pembuatan keputusan harus dilakukan melalui prosedur yang melibatkan publik). Sedangkan *government for the people* lebih mengacu kepada substansi (mekanisme politik yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik) artinya dalam setiap pembuatan kebijakan publik, substansi dari kebijakan publik tadi harus berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintahan yang demokratis dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang dalam proses maupun hasil keputusannya benar-benar mencerminkan atau mewakili kepentingan, aspirasi dan keinginan rakyat yang diwakilinya.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD harus memahami kebutuhan rakyat yakni secara proaktif memotret kondisi riil daerahnya untuk dipelajari dan dianalisa dalam

rangka membuat berbagai kebijakan daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, DPRD dapat menjalankan berbagai cara, baik secara aktif maupun pasif. Peran aktif dapat dilakukan dengan upaya menjaring aspirasi masyarakat daerah, misalnya melalui mekanisme *pooling* (jajak pendapat) guna menjaring aspirasi publik mengenai sesuatu isu, atau cara-cara lain yang menuntut keaktifan anggota DPRD. Sedangkan peran pasif dapat dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat, melalui kotak pos, kotak pengaduan, surat pembaca pada media massa lokal, saluran telepon bebas pulsa, *website* atau cara-cara lain dimana DPRD senantiasa siap melayani aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang datang secara langsung atau melalui media lain.

Besarnya harapan terhadap kinerja DPRD sebagai wakil rakyat dalam proses penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) nampaknya masih perlu dipertanyakan. Berdasarkan data yang dihimpun Kompas (2004) lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal masih mementingkan kepentingan diri sendiri. Kebijakan yang dirumuskan pun sebagian besar masih berorientasi pada eksekutif (Aisyah: 2008). Demikian pula halnya dengan penyusunan anggaran daerah, sebagian besar inisiatif masih berasal dari eksekutif. Oleh karena itu, penyusunan anggaran daerah masih perlu dipertanyakan.

Kota Depok sebagai daerah pemekaran baru perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan fungsi budgeting. Sebagai daerah pemekaran, yang sudah memiliki struktur pemerintahan yang lengkap, termasuk badan legislatifnya, Kota Depok perlu dilihat sejauh mana fungsi pemerintahan sudah berjalan termasuk fungsi budgeting.

Sebagaimana daerah-daerah yang lain dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban, sebagaimana di atur dalam pasal 22 UUNomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut.

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
- b. meningkatkan kehidupan demokrasi
- c. mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. menyediakan pelayanan dasar pendidikan
- g. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

- h. mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. melestarikan lingkungan hidup
- l. mengelola administrasi kependudukan
- m. melestarikan nilai sosial budaya
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; serta
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai “Politik Penyusunan Anggaran Daerah”. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penerapan akuntabilitas publik dalam penyusunan anggaran daerah di Kota Depok. Alasan pemilihan lokasi di pemerintahan Kota Depok adalah peneliti ingin mengkaji secara lebih mendalam bagaimana politik penyusunan anggaran daerah pada Pemerintahan Kota Depok.

B. Permasalahan

Fungsi penganggaran dalam konteks ilmu politik dan pemerintahan sangat melekat dengan teori dan praktek demokrasi. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan konsep *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Konsep penganggaran berkaitan dengan ranah pemerintahan untuk *dari rakyat dan untuk rakyat*.

Permasalahan penyusunan anggaran penting untuk dikaji karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah pada hakikatnya adalah berasal dari rakyat, sehingga fokus anggaran selayaknya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat pula. Proses penyusunan anggaran daerah di Kota Depok seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat. Aisyah (2010) mengatakan bahwa anggaran daerah di Kota Depok belum mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sebagian besar peraturan daerah yang dihasilkan sebagian besar ditujukan untuk memperbesar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa disertai kompensasi untuk kesejahteraan masyarakat Depok. Komunikasi antara DPRD Depok dengan konstituen juga belum dilaksanakan secara baik dan mendalam, sehingga keterbukaan dan ketersediaan akses informasi

permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran daerah masih rendah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana politik dalam penyusunan anggaran daerah? Penelitian ini memfokuskan pada kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penerapan akuntabilitas publik dalam penyusunan anggaran daerah. Rumusan permasalahan tersebut dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh faktor kontrol legislatif, kontrol administratif internal, peran media massa dan opini publik terhadap kualitas penerapan akuntabilitas penyusunan anggaran daerah?
2. Seberapa besar pengaruh kontrol legislatif terhadap kualitas penerapan akuntabilitas penyusunan anggaran daerah?
3. Seberapa besar pengaruh kontrol administratif internal terhadap kualitas penerapan akuntabilitas penyusunan anggaran daerah?
4. Seberapa besar pengaruh peran media massa dan opini publik terhadap kualitas penerapan akuntabilitas penyusunan anggaran daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh pemahaman tentang faktor kontrol legislatif, kontrol administratif internal, peran media massa dan opini publik terhadap kualitas penerapan akuntabilitas publik dalam penyusunan anggaran daerah
2. Menemukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kualitas penerapan akuntabilitas publik dalam penyusunan anggaran daerah.
3. Memperoleh gambaran umum melalui hasil kajian dan analisis tentang politik penyusunan anggaran daerah

D. Signifikansi Penelitian

- a. memperkaya khasanah pengetahuan tentang ilmu pemerintahan terapan khususnya konsep akuntabilitas politik dalam penyusunan anggaran daerah.
- b. menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyusunan anggaran daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Negara yang menganut paham demokrasi berlaku konsep kedaulatan rakyat. Filosofi pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung arti bahwa pejabat Negara dipilih rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pejabat Negara merupakan wakil rakyat, yang mempunyai kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat berimplikasi pada konsep setiap pengambilan keputusan atau kebijakan semuanya bermuara pada kepentingan rakyat.

Pada Negara yang menerapkan demokrasi perwakilan, seperti di Indonesia, parlemen dianggap sebagai yang mewakili rakyat atau wakil rakyat. Oleh karena itu parlemen atau lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada rakyat. Koswara, sebagaimana dikutip oleh Salamm (2002) menyatakan bahwa otonomi yang luas dan bertanggung jawab ditujukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan anggaran daerah oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat.

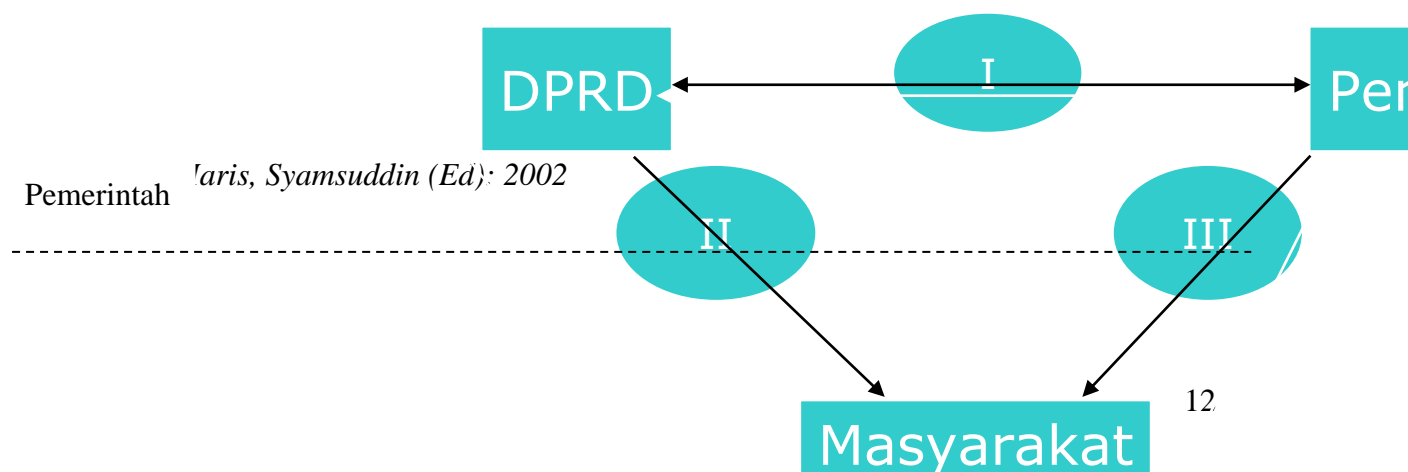
Fungsi DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat lokal meliputi fungsi legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan.

- a. Fungsi membuat peraturan perundang-undangan. Fungsi badan perwakilan rakyat yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif atau badan pembuat undang-undang kepadanya. Melalui fungsi ini Parlemen, menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang yang dihasilkan.
- b. Fungsi budgeting. Fungsi ini terkait dengan kewenangan badan perwakilan dalam menentukan pemasukan dan pengeluaran uang negara. Uang yang dipakai oleh pemerintah pada hakikatnya adalah uang rakyat, dimana pembelanjaan negara diambil dari pajak, bantuan atau pinjaman dari luar negeri, semuanya tentunya menjadi beban rakyat. Fungsi penerimaan dan belanja tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus dilihat sebagai kembar.

- c. Fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan adalah pengawasan politis. Sebagai pengawas, lembaga ini memerlukan data dan keterangan yang memadai. Bahan itu didapatnya melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pengawas keuangan, politisi, kalangan media massa di samping sumber yang dimiliki sendiri seperti staf ahli. Pengawasan politis dapat dilakukan dengan memanfaatkan hak-hak yang dimiliki oleh anggota dewan. Hak anggota parlemen meliputi hak bertanya, interplasi, angket dan mosi. Hak interplasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaanya di sesuatu bidang. Dalam hal ini, badan eksekutif wajib memberikan penjelasan dalam sidang pleno, dimana penjelasan tersebut kemudian dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. Sedang mosi merupakan pernyataan lembaga perwakilan rakyat akan ketidakpercayaan atau kepercayaannya terhadap kebijaksanaan maupun pejabat eksekutif.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat hubungan yang saling terkait antara pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD. Keseluruhan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan pada kesejahteraan masyarakat. Pola pertanggungjawaban di antara ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1: Pola Akuntabilitas Pemerintahan



Menurut Salamm (2002), pada wilayah I, hubungan yang terjadi antara institusi DPRD selaku badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah selaku badan eksekutif daerah. Di dalam konteks ini proses akuntabilitas bersifat antarlembaga, yang dari sudut teori dikenal dengan istilah *checks and balances*. Pada wilayah II, menunjukkan pola pertanggungjawaban badan perwakilan rakyat (DPRD) terhadap rakyat. Pada wilayah ini terjadi suatu proses demokrasi paling langsung antara wakil rakyat dan rakyatnya. Sedangkan pada wilayah III, terjalin interaksi antara pemerintah daerah dengan rakyat. Umumnya hubungan antara Pemerintah Daerah dengan rakyat bersifat tidak langsung. Namun bukan berarti pemerintah daerah dapat melepaskan diri dari kepentingan masyarakat.

Fungsi penganggaran terkait erat dengan konsep akuntabilitas. Menurut Turner dan Halme, sebagaimana dikutip oleh Salamm akuntabilitas meliputi 6 (enam) hal, yakni:

- a. Adanya legitimasi bagi para pembuat keputusan
- b. Kepemimpinan yang mengedepankan moral (*moral conduct*)
- c. Adanya kepekaan (*responsiveness*)
- d. Keterbukaan (*openness*)
- e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
- f. Upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas

A. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung makna adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya, terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Menurut Adisasmita (2011), akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, sehingga dalam negara otokratik tidak terdapat transparansi, akuntabilitas akan hilang. Pemerintah harus menyadari bahwa pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Ada empat dimensi yang membedakan akuntabilitas, yaitu:

- a. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas
- b. Kepada siapa dia melaksanakan akuntabilitas
- c. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitas
- d. Nilai akuntabilitas itu sendiri.

Paul (1991) mengkategorikan akuntabilitas sebagai:

- a. *Democratic Accountability*. Akuntabilitas demokrasi merupakan gabungan antara political dan administrative accountability. Pemerintah accountable atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik yang telah memilih mereka
- b. *Professional Accountability*. Dalam akuntabilitas profesional para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilandasi oleh norma-norma dan standar profesi. Mereka diperkenankan untuk menentukan public interest sesuai dengan norma-norma dan standar yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat.
- c. *Legal Accountability*. Kategori akuntabilitas ini memberikan batasan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum disesuaikan untuk kepentingan public goods dan public services yang memang dituntut oleh seluruh masyarakat. Dengan akuntabilitas ini maka petugas pelayanan publik akan dapat dituntut di pengadilan apabila mereka gagal melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Adisasmita (2011) mengemukakan faktor pendorong dan penghambat keberhasilan

akuntabilitas. Faktor pendorong keberhasilan akuntabilitas diantaranya adalah :

- a. Kepemimpinan yang berkemampuan. Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah diperlukan pemimpin yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun masyarakat.
- b. Debat publik. Sebelum kebijakan pokok/besar/penting disahkan seharusnya dilakukan debat publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan yang maksimal. Dengan demikian akan diketahui apa dan bagaimana indikator kinerja yang harus dicapai organisasi, masyarakat.
- c. Koordinasi. Koordinasi yang baik di dalam organisasi/instansi maupun antar instansi-instansi pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan, karena adanya konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang berkoordinasi.
- d. Otonomi. Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang dianggap paling efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksud adalah pada teknis pelaksanaan, tetapi harus tetap terpadu dengan kebijakan nasional. Otonomi jangan sampai mengurangi koordinasi dan keberhasilan tujuan nasional.

- e. Dapat diterima oleh semua pihak. Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.
- f. Negosiasi. Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. Penentuan siapa yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu ditetapkan.
- g. Perlu pemahaman masyarakat. Perlu dibuat pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal baru tersebut.
- h. Adaptasi secara terus menerus. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus-menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan akuntabilitas adalah

- a. Ketidakpedulian terhadap hak-hak dan masalah-masalah sosial. Ketidakpedulian terhadap hak-hak dan masalah sosial cenderung menimbulkan peluang yang tinggi terhadap kurangnya akuntabilitas, terjadinya malpraktik, nepotisme, sogok menyogok (suap) dan korupsi. Semakin kurangnya rasa saling tolong menolong dan tenggang rasa di antara anggota dan kelompok masyarakat akan menimbulkan rasa tidak peduli yang semakin tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap individu sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri dan kurang menghiraukan kesengsaraan orang lain, sehingga lupa pada penyelenggaraan tugas pemerintah, hal ini akan melemahkan akuntabilitas.
- b. Standar kehidupan yang rendah. Pegawai dengan standar gaji yang rendah, memiliki kecenderungan untuk mencari tambahan penghasilan agar dapat memenuhi kehidupan keluarganya. Dalam kondisi demikian, setiap cara mencari penghasilan tambahan yang dikatakan tidak benar dianggap wajar dan normal, maka dampaknya adalah mengorbankan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik menjadi terabaikan dan mendorong malpraktik administrasi publik.
- c. Penurunan nilai moral. Sikap hidup yang materialisme dan konsumerisme mendorong menurunnya akuntabilitas. Sikap moral sangat menentukan dalam cara hidup untuk memberikan nilai-nilai baik dan buruk. Sikap hidup yang materialisme dan

konsumerisme dapat menurunkan moral dan tanggung jawab pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat, yang seharusnya dilayani dengan baik dan berkualitas.

- d. Sikap saling membiarkan. Penurunan nilai-nilai moral mendorong manusia akan mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Akibatnya mereka saling berlomba mencari keuntungan masing-masing dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar khususnya pelayanan kepada masyarakat luas. Sikap pemerintah yang membiarkan tindakan negatif tersebut dan tidak memberikan sanksi yang tegas akan merugikan pelaksanaan akuntabilitas pada saat sekarang dan masa mendatang.
- e. Faktor budaya. Budaya yang berkembang secara luas, di mana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan kepentingan dirinya dan keluarganya daripada kepentingan publik merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Budaya semacam ini akan menyuburkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- f. Monopoli pemerintah. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, setiap keputusan dan kebijakan publik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan penumpukan tanggungjawab sehingga sulit mengelola, memantau dan mengevaluasinya. Birokrasi yang terlalu besar dan berbelit-belit telah mengurangi pelaksanaan akuntabilitas. Masyarakat hanya menjadi penonton. Kemajuan pembangunan berjalan sangat lamban.
- g. Defisiensi dalam sistem akuntansi. Buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntansi secara penuh. Akuntabilitas membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi yang benar dan memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang baik. Kelemahan yang banyak dialami adalah sistem informasi yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan, sistem internal control dan internal check yang tidak akurat, serta manajemen yang tidak profesional dan tidak kompeten.
- h. Tidak ada tindakan korektif. Pemerintah yang melakukan kontrol sangat ketat terhadap media massa dan pemberitaan akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan tidak akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada keleluasaan dan kebebasan melakukan tindakan korektif terhadap praktik-praktik negatif penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak berani mengeluarkan pendapat, sehingga para pejabat pemerintah akan leluasa melakukan kesalahan yang disengaja.
- i. Konflik dalam perspektif dan kekurangan mata rantai institusional. Dengan terlalu ketatnya birokrasi di sektor publik, akan mengakibatkan sulit melakukan review

terhadap program-program sektor publik, dan akan sulit menentukan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkannya. Informasi mengenai apa yang ditargetkan dan bagaimana realisasinya biasanya tidak tersedia, sehingga sulit untuk mengetahui capaian kinerjanya suatu instansi pemerintah.

- j. Kualitas pejabat. Kualitas pejabat mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas. Pertama, dengan besarnya jumlah modal untuk membiayai seluruh program pemerintah, maka dibutuhkan pula jumlah pegawai pemerintah dalam jumlah yang banyak. Namun sayangnya kualitas mereka relatif rendah, sehingga menimbulkan inefisiensi, pemborosan dan tidak berjalannya akuntabilitas. Masalah yang kedua adalah material yang tersedia (prasarana dan sarana yang tersedia) kurang menunjang peningkatan efisiensi dan tidak mendorong motivasi para birokrat untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya.

Seperti dikemukakan di atas bahwa penyelenggara pemerintahan selayaknya mengedapnkan prinsip akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemerintahan, terutama yang menyangkut pada kepentingan masyarakat. Haylar (1991) memberikan pedoman untuk mengukur kualitas akuntabilitas sebagai berikut.

Tabel 1: Tujuan dan Indikator Akuntabilitas

No	Tujuan	Sarana
1	Legitimasi pembuat kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Konstitusi • Sistem pemilu daerah dan lembaga-lembaga perumus kebijakan • Sistem perwakilan dalam birokrasi • Legislasi • Delegasi kewenangan formal • Peraturan-peraturan teknis
2	Perilaku moral	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai sosial • Konsep keadilan sosial dan kepentingan umum • Nilai-nilai profesional • Program-program pelatihan
3	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dan konsultasi publik • Debat publik • Lembaga-lembaga advokasi • Pertemuan umum • Kebebasan berpendapat
4	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di parlemen • Layanan informasi umum • Kebebasan memperoleh informasi umum • Dengar pendapat umum • Laporan tahunan
5	Penggunaan sumber daya secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran • Prosedur keuangan

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan petunjuk teknis • Pemeriksaan (Auditing) • Pertanyaan dan partisipasi publik • Sistem perencanaan formal
6	Perbaiki efisiensi dan efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi • Pemeriksaan penggunaan uang (<i>value for money</i>) • Penetapan tujuan dan standar • Petunjuk pelaksanaan program • Hasil penilaian • Umpan balik dari masyarakat

B. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Pada Sektor Publik

Secara global Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyusunan anggaran pada sektor publik. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (*diskresi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit anggaran. (Mardiasmo, 2002:26). Sistem pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan tujuan agar uang rakyat dilakukan secara transparan dengan berdasarkan pada konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam manajemen keuangan daerah meliputi:

- a. Akuntabilitas
- b. *Value for money*
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*)
- d. Transparansi
- e. Pengendalian

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Value for Money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik

(*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan korupsi dapat diminimalkan. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antar pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pengendalian pada hakikatnya merupakan monitoring penerimaan dan belanja daerah dengan cara membandingkan antara anggaran dan tingkat pencapaiannya. Untuk itu perlu dilakukan analisis varian (selisih) terhadap penerimaan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :

- a. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- c. Keutuhan Anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*)
- d. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- e. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan
- f. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran

- g. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
- h. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

(Sumber: <http://www.scribd.com/doc/39791678/3/Prinsip-prinsip-Anggaran-Sektor-Publik> diunduh tanggal 27 Desember 2011, 16:05)

C. Teori Polidano

Polidano (1998) menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menegakkan akuntabilitas. Metode tersebut dapat dijadikan tolok ukur dalam menganalisis penerapan akuntabilitas. Ukuran tersebut adalah kontrol legislatif, akuntabilitas legal, keberadaan lembaga ombudsman, desentralisasi dan partisipasi, kontrol administratif internal, serta media massa dan opini publik. Berikut adalah penjelasan Polidano.

Kontrol Legislatif: Di banyak negara, legislatif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di dalamnya. Jika komisi-komisi legislatif dapat berfungsi secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan (meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat), mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja.

Akuntabilitas Legal: Ini merupakan karakter dominan dari suatu negara hukum. Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang didasarkan pada badan peradilan yang independen. Aturan hukum yang dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki sistem peradilan, dan semua pejabat publik dapat dituntut pertanggung jawabannya di depan

pengadilan atas semua tindakannya. Peran lembaga peradilan dalam menegakkan akuntabilitas berbeda secara signifikan antara negara, antara negara yang memiliki sistem peradilan administratif khusus seperti Perancis, hingga negara yang memiliki tatanan hukum di mana semua persoalan hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang sama, termasuk yang berkaitan dengan pernyataan tidak puas masyarakat terhadap pejabat publik. Dua faktor utama yang menyebabkan efektivitas akuntabilitas legal adalah kualitas institusi hukum dan tingkat akses masyarakat atas lembaga peradilan, khususnya yang berhubungan dengan biaya pengaduan. Institusi hukum yang lemah dan biaya yang mahal (tanpa suatu sistem pelayanan hukum yang gratis) akan menghambat efektivitas akuntabilitas legal.

Ombudsman: Dewan ombudsmen, baik yang dibentuk di dalam suatu konstitusi maupun legislasi, berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat. Ombudsmen mengakomodasi keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan menyusun rekomendasi tentang bagaimana keluhan tersebut diatasi tanpa membebani masyarakat. Sejak diperkenalkan pertama kali di Swedia pada abad 19, Ombudsmen telah menyebar ke berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, masyarakat dapat mengajukan keluhannya secara langsung kepada lembaga ini, baik melalui surat maupun telepon. Di beberapa negara, misalnya Inggris, Ombudsmen dilihat sebagai perluasan kontrol parlemen terhadap eksekutif dan keluhan masyarakat disalurkan melalui anggota parlemen. Pada hampir semua kasus, Ombudsmen melakukan tugas investigatifnya tanpa memungut biaya dari masyarakat.

Desentralisasi dan Partisipasi: Akuntabilitas dalam pelayanan publik juga dapat ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesentralisasi dan partisipasi. Terdapat beberapa situasi khusus di mana berbagai tugas pemerintah didelegasikan ke tingkat lokal yang dijalankan oleh para birokrat lokal yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat lokal. Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam kasus pemerintah pusat. Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem yang terdesentralisasi lebih merupakan fungsi otonomi di tingkat lokal. Itupun sangat bervariasi secara signifikan sesuai derajat otonomi yang diperoleh, dari otonomi yang sangat luas seperti di AS hingga otonomi terbatas yang umum dijumpai di negara-negara berkembang. Ketergantungan yang tinggi terhadap NGOs dan berbagai organisasi dan koperasi berbasis masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik menjadi salah satu perkembangan yang menjanjikan bagi terwujudnya manajemen publik yang terdesentralisasi dan bertanggung jawab.

Kontrol Administratif Internal: Pejabat publik yang diangkat sering memainkan peran dominan dalam menjalankan tugas pemerintahan karena relatif permanennya masa jabatan serta keterampilan teknis. Biasanya, kepala-kepala unit pemerintahan setingkat menteri diharapkan dapat mempertahankan kontrol hirarkis terhadap para pejabatnya dengan dukungan aturan dan regulasi administratif dan finansial dan sistem inspeksi. Untuk negara-negara dengan struktur administratif yang lemah, terutama di negara-negara berkembang dan beberapa negara komunis, metode kontrol tersebut memiliki dampak yang terbatas. Masalah ini disebabkan karena hubungan yang kurang jelas antara kepemimpinan politik yang bersifat temporer dan pejabat publik yang diangkat secara permanen. Jika mereka melakukan persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa diwujudkan (hal ini juga terjadi sejak lama di negara-negara maju) dan jika mereka terlibat dalam konflik, maka yang menjadi korban adalah kepentingan publik.

Media massa dan Opini Publik: Hampir di semua konteks, efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung tingkat dukungan media massa serta opini publik. Tantangannya, misalnya, adalah bagaimana dan sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. Terdapat 3 faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan opini publik. *Pertama*, kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima dan dihormati. Di banyak negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur dari peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi, dan asosiasi profesional. *Kedua*, pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Kuncinya adalah adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui konstitusi (misalnya, UU Kebebasan Informasi) dengan hanya mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat diakses secara luas antara lain meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap berbagai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit dibatasi. *Ketiga*, adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya.

Dalam penelitian ini, akan dikaji tentang bagaimana politik penyusunan anggaran daerah, dengan memfokuskan pada variabel kontrol legislatif, kontrol administratif, dan peran media dan opini publik terhadap kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah. Fokus penelitian ini adalah mencari faktor yang mempunyai pengaruh dominan dalam kualitas penerapan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kajian pustaka, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Kualitas penerapan akuntabilitas penyusunan anggaran daerah ditentukan oleh faktor kontrol legislatif, kontrol administratif internal, serta peran media massa dan opini publik.
2. Besarnya pengaruh kontrol legislatif terhadap kualitas penerapan akuntabilitas penyusunan anggaran ditentukan oleh kecukupan dan fungsi alat kelengkapan DPRD, pengetahuan anggota DPRD tentang tugas-tugas Fraksi dan Komisi, intensitas diskusi dalam fraksi dan komisi, kualitas Diskusi Fraksi dan Komisi, responsivitas Fraksi dan Komisi, serta keterbukaan Fraksi dan komisi kepada masyarakat.
3. Besarnya pengaruh kontrol administratif internal terhadap kualitas penerapan akuntabilitas penyusunan anggaran ditentukan oleh kontrol hirarkis terhadap para pejabatnya, dukungan aturan regulasi administratif dan finansial, dan sistem inspeksi
4. Besarnya pengaruh peran media massa dan opini publik terhadap kualitas penerapan akuntabilitas penyusunan anggaran ditentukan oleh kebebasan berekspresi dan berserikat, peran kelompok kepentingan dan tekanan, transparansi, akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara

B. Variabel dan Instrumen

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas yakni kontrol legislatif (X1), kontrol administratif internal (X2), peran media massa dan opini publik (X3) dengan simbol dan variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y, yakni kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah.

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tingkat keterpengaruhan variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Untuk itulah, penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode *eksplanatori survey*, yakni menjelaskan dan menganalisis besarnya pengaruh kepemimpinan, koordinasi, negosiasi, otonomi, dan pemahaman masyarakat baik secara parsial maupun secara utuh terhadap kualitas akuntabilitas penyusunan anggaran daerah. Pertimbangan mendasar penelitian ini dilakukan dengan desain kuantitatif, adalah bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas akuntabilitas, yakni: kontrol legislatif, kontrol administratif internal, peran media massa dan opini publik berikut indikatornya dapat diukur dengan menggunakan bantuan statistik. Untuk selanjutnya data hasil penelitian tersebut diuji sesuai tidaknya dengan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, sebagaimana pula sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Agar keberadaan data penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai ukuran besaran pengaruh dari setiap variabel penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan pengujian kausalitas dari faktor-faktor pada variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 2

Variabel dan Dimensi

No	Variabel	Dimensi
1	Kualitas Akuntabilitas Penyusunan Anggaran Daerah (Y):	<ul style="list-style-type: none"> • Responsivitas • Keterbukaan • Penggunaan sumber daya secara optimal • Perbaikan efisiensi dan efektivitas
2	Kontrol Legislatif (X ₁)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan dan fungsi alat kelengkapan DPRD • Pengetahuan anggota DPRD tentang tugas-tugas Komisi • Intensitas diskusi dalam fraksi dan komisi • Kualitas Diskusi Fraksi dan Komisi • Responsivitas Fraksi dan Komisi • Keterbukaan Fraksi dan komisi kepada masyarakat
3	Kontrol Administratif Internal (X ₄)	<ul style="list-style-type: none"> • kontrol hirarkis terhadap para pejabatnya • dukungan aturan • regulasi administratif dan finansial • sistem inspeksi
4	Media massa dan Opini Publik (X ₆)	<ul style="list-style-type: none"> • kebebasan berekspresi dan berserikat diterima dan dihormati • peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi, dan asosiasi profesional • tugas pemerintah harus transparan • akses masyarakat terhadap informasi • Informasi yang dihasilkan pemerintah dapat diakses secara luas antara lain meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit • pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara • pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara, • kesiapan sebagai warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban

C. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Analisis validitas instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mampu mengukur obyek yang diukurnya, untuk itu sebuah alat ukur dikatakan valid apabila alat tersebut mampu mengukur obyek yang diukurnya. Oleh karena itu untuk mengukur validitas instrumen, penulis menggunakan validitas internal yaitu berupa uji validitas dengan menganalisis butir pada masing-masing variabel (analisis pada tiap variabel secara terpisah).

Uji Reliabilitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen angket sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Formula yang dipergunakan untuk menguji reliabilitas instrumen angket dalam penelitian ini adalah Koefisien Alfa (α) dari Cronbach.

D. Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses penyusunan anggaran daerah pada pemerintah Kota Depok. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yang meliputi anggota DPRD, pimpinan pada Dinas Daerah di Pemerintahan Kota Depok, partai politik dan tokoh masyarakat. Tabel 3 menggambarkan sebaran responden penelitian.

Tabel 3
Sebaran Responden

No	Kategori Responden	Jumlah
1.	Anggota DPRD	50 orang
2.	Pimpinan Dinas Pimpinan Partai politik	22 orang
3.	Tokoh Masyarakat	20 orang
4.		20 orang

Total	102 orang
--------------	------------------

Sumber: Pemda Kota Depok (2011).

Atas dasar pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian karena besarnya ruang lingkup populasi sasaran yang diteliti maka besarnya sampel didasarkan pada pendapat Slovin (*dalam* Umar, 1998) dengan mengambil persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu minimal 10 % . Dalam penelitian ini responden ditentukan sebanyak 50 responden (50%).

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dengan jawaban yang telah dikategorikan dalam bentuk angka, mengikuti skala likert. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket; teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, yang setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban, sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang telah dimodifikasi. Angket disusun berdasarkan urutan variabelnya masing-masing jawaban yang menurut responden paling tepat, dipilih dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia. Penilaian atas pilihan jawaban untuk angket yang disediakan adalah sebagai berikut :
 - Sangat Baik/sangat memuaskan/sangat sesuai/sangat paham, diberi skor 4.
 - Baik/memuaskan/sesuai/paham, diberi skor 3.
 - Cukup baik/cukup memuaskan/cukup sesuai/cukup paham/cukup setuju, diberi skor 2.
 - Tidak Baik/kurang baik/kurang memuaskan/kurang sesuai/kurang paham diberi skor 1.
2. Observasi; teknik ini mendeskripsikan secara rinci *setting* yang diamati, kegiatan yang terjadi dalam *setting* tersebut, partisipan yang terlibat, mengamati semua keadaan dan kegiatan, serta berinteraksi dengan partisipan. Pengamatan ini menitikberatkan pada kemampuan dan perilaku aparatur sekaligus juga terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Observasi ini dimaksudkan untuk memeriksa dan mendalami proses wawancara dan

penyebaran angket dengan keadaan dan situasi yang terkait dengan masalah penelitian.

3. Studi Dokumentasi dan kepustakaan; teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik yang sifatnya kajian teoritik maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah dan administrasi pelayanan publik.
4. Wawancara: sebagai teknik komunikasi langsung untuk mendapatkan verifikasi informasi secara lebih mendalam

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel kepemimpinan, koordinasi, otonomi dan pemahaman masyarakat terhadap kualitas akuntabilitas penyusunan anggaran pada Pemkot Depok. Untuk penggunaan teknik analisis jalur diperlukan syarat data yang mempunyai tingkat sekurang-kurangnya interval. Untuk keperluan tersebut, akan dilakukan konversi data dari tingkat pengukuran ordinal menjadi skala interval. Teknik yang digunakan adalah *Method of Successive Interval* (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan f (frekuensi) responden yaitu banyaknya responden yang memberikan respons untuk masing-masing kategori yang ada.
2. Membagi setiap bilangan pada f dengan banyaknya responden total, sehingga diperoleh proporsi.
3. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respons sehingga keluar proporsi kumulatif. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku.
4. Menghitung nilai Z berdasarkan proporsi kumulatif. Setelah nilai Z diketahui nilainya, selanjutnya ditentukan nilai *density*-nya dengan menggunakan tabel [*Ordinates (Y) the Normal Curve at Z*].
5. Menghitung SV (*Scale Value*) dengan rumus:

$$SV = \frac{Density_{at\ lower\ limit} - Density_{at\ upper\ limit}}{Area_{under\ upper\ limit} - Area_{under\ lower\ limit}}$$

Keterangan:

Density at lower limit = Nilai Densitas Batas Bawah
Density at upper limit = Nilai Densitas Batas Atas
Area under upper limit = Daerah di Bawah Batas Atas
Density under lower limit = Daerah di Bawah Batas Bawah.

6. Mengubah SV yang nilainya terkecil menjadi sama dengan satu, sehingga diperoleh *Transformed Scale Value* (TSV).

$$Transformed\ Scale\ Value: Y = SV + ISV_{Min} I$$

7. Mengganti setiap skor dengan nilai Y yang sesuai untuk masing-masing skor dalam satu item.

Untuk menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan serta untuk menganalisis data yang diperoleh, dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS 17.0 (*Statistical Package for Social Science*) for Windows.

Dari 50 kuesioner yang disebar, yang kembali dan diolah sebanyak 38 kuesioner.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

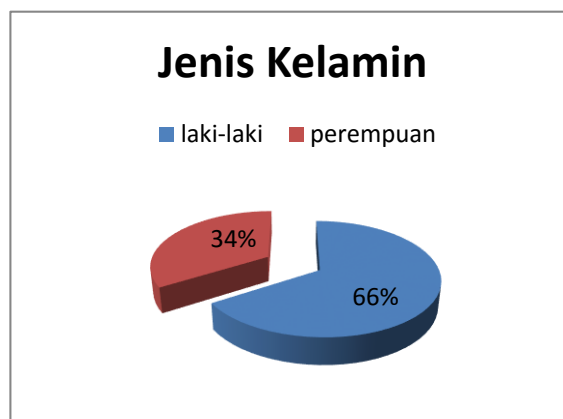
Bab IV ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang terdiri dari sebaran responden, persepsi mengenai kontrol legislatif, kontrol administrasi internal, peran media dan opini publik, persepsi tentang kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran serta

pengujian hubungan antara variabel X1,X2,X3 dengan kualitas akuntabilitas.Berikut uraiannya.

A. Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Usia, dan Peranan dalam Kelompok

a. Jenis Kelamin

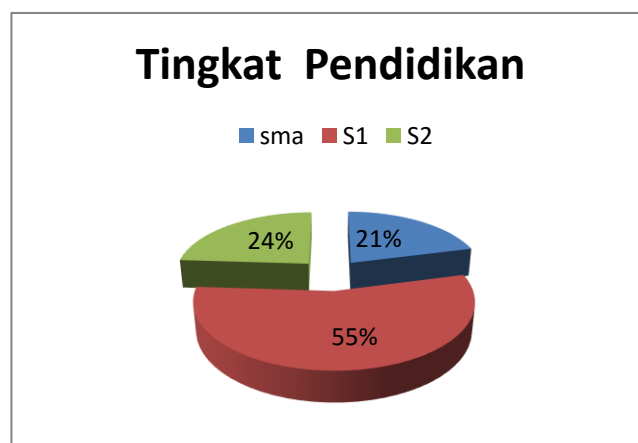
Sebaran jenis kelamin dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 2. Laki-laki sebanyak 34%, sedangkan perempuan sebesar 66%.



Gambar 2: Sebaran Jenis Kelamin

b. Pendidikan

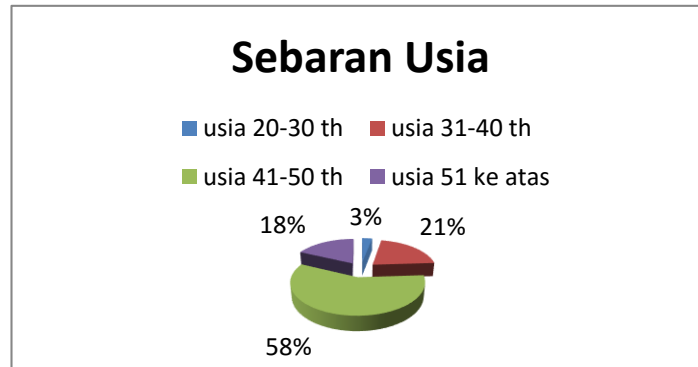
Sebaran tingkat pendidikan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 3. Mayoritas responden berpendidikan Sarjana S1, yaitu sebesar 55%, tamat SMA sebesar 24%, dan yang berpendidikan S2 sebanyak 21%.



Gambar 3: Sebaran Tingkat Pendidikan

c. Usia

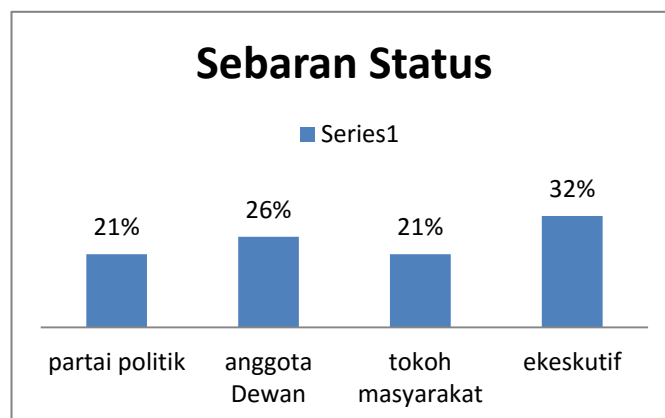
Sebaran usia dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 4. Mayoritas responden berusia antara 41-50 tahun, yaitu sebesar 58%, usia 31-40 sebesar 21%, berusia 51 tahun ke atas sebesar 18% dan yang berusia 20-30 tahun hanya sebesar 3%.



Gambar 4: Sebaran Usia

d. Sebaran Status dalam Kelompok

Sebaran status responden dalam kelompok ditunjukkan dalam Gambar 5. Status dalam kelompok dibagi dalam empat kategori, yaitu anggota DPRD, kelompok eksekutif, partai politik, dan tokoh masyarakat. Dalam penelitian ini, kelompok eksekutif sebesar 32%, kelompok anggota DPRD sebanyak 26%, partai politik dan tokoh masyarakat masing-masing sebanyak 21%.



Gambar 5: Sebaran Status dalam Kelompok

B. Kontrol Legislatif, Kontrol Administrasi, dan Pengaruh Media dan Opini Publik, serta Kualitas Akuntabilitas

Pada bagian ini, akan diuraikan persepsi masing-masing kelompok terhadap variabel X1,X2,X3 dan Y. Berikut uraiannya.

a. Persepsi tentang Kontrol Legislatif

Persepsi tentang bagaimana kontrol legislatif dilaksanakan dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan status dalam kelompok. Berdasarkan kelompok tingkat pendidikan, yang berpendidikan tamat SMA sebanyak 10,5 % dari total responden menyatakan kontrol legislatif berada pada kategori sedang. Sebanyak 52,6% dari total responden menyatakan kontrol legislatif dilaksanakan dengan kategori tinggi. Dan yang berpendidikan S2 menyatakan kontrol legislatif dilaksanakan dengan sangat baik (tinggi), yakni sebanyak 18,4 %. Sedangkan sisanya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4: Persepsi Kelompok Pendidikan terhadap Kontrol Legislatif

pendidikan * kontrol legislatif Crosstabulation						
			kontrol legislatif			Total
			rendah	sedang	tinggi	
pendidikan	sma	Count	3	4	1	8
		% of Total	7.9%	10.5%	2.6%	21.1%
	S1	Count	1	0	20	21
		% of Total	2.6%	.0%	52.6%	55.3%
	S2	Count	0	2	7	9
		% of Total	.0%	5.3%	18.4%	23.7%
	Total	Count	4	6	28	38
		% of Total	10.5%	15.8%	73.7%	100.0%

Persepsi bagaimana kontrol legislatif dilaksanakan yang dilihat berdasarkan dari jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 5. Kontrol legislatif dilaksanakan dengan sangat baik (tinggi) yakni dinyatakan oleh kelompok laki-laki (50%) dan kelompok perempuan (23,7%). Persepsi sedang dinyatakan oleh kelompok laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 7,9%. Sedangkan persepsi buruk dinyatakan oleh kelompok laki-laki (7,9%) dan kelompok perempuan (2,6%). Persepsi keseluruhan berdasarkan kelompok jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5: Tabel Silang Jenis Kelamin dan Kontrol Legislatif

jenis kelamin * kontrol legislatif Crosstabulation

			kontrol legislatif			Total	
			rendah	sedang	tinggi		
jenis kelamin	laki-laki	Count	3	3	19	25	
		% of Total	7.9%	7.9%	50.0%	65.8%	
	perempuan	Count	1	3	9	13	
		% of Total	2.6%	7.9%	23.7%	34.2%	
	Total		Count	4	6	28	38
			% of Total	10.5%	15.8%	73.7%	100.0%

Persepsi kontrol legislatif berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa mayoritas laki-laki (50%) menyatakan kontrol legislatif dilaksanakan dengan intensitas tinggi, sedangkan perempuan yang menyatakan hal serupa sebanyak 23%. Kontrol legislatif dalam kategori sedang dinyatakan oleh laki-laki dan perempuan masing masing sebesar 7,9%. Sisanya menyatakan kontrol legislatif rendah dinyatakan oleh laki-laki 7,9% dan perempuan sebanyak 10,5%. Persepsi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6: Tabel Silang Usia dan Kontrol Legislatif

usia * kontrol legislatif Crosstabulation

			kontrol legislatif			Total
			rendah	sedang	tinggi	
usia	usia 20-30 th	Count	0	1	0	1
		% of Total	.0%	2.6%	.0%	2.6%
	usia 31-40 th	Count	2	0	6	8
		% of Total	5.3%	.0%	15.8%	21.1%
	usia 41-50 th	Count	0	4	18	22
		% of Total	.0%	10.5%	47.4%	57.9%
	usia 51 ke atas	Count	2	1	4	7
		% of Total	5.3%	2.6%	10.5%	18.4%
Total	Count	4	6	28	38	
	% of Total	10.5%	15.8%	73.7%	100.0%	

Tabel 6 menggambarkan persepsi tentang kontrol legislatif berdasarkan usia. Persepsi kontrol legislatif tinggi dikatakan oleh kelompok usia 40-50 tahun yakni sebesar 47,4%, disusul oleh kelompok usia 31-40 tahun dan usia 51 tahun ke atas yakni masing-masing sebesar 15,8% dan 10,5%. Persepsi kontrol legislatif dalam kategori sedang dinyatakan oleh kelompok usia 41-50 tahun yakni sebesar 10,5 %. Sedangkan persepsi kontrol legislatif dalam kategori rendah dinyatakan oleh kelompok usia 31-40 tahun dan usia 51 tahun ke atas, masing-masing sebesar 5,3%. Persepsi selengkapnya dari kelompok usia tentang kontrol legislatif dapat dilihat pada Tabel 6.

b. Kontrol Administratif

Tabel 7: Tabel Silang Jenis Kelamin dan Kontrol Administratif Intern

jenis kelamin * kontrol adminstrasi Crosstabulation						
			kontrol adminstrasi			Total
			rendah	sedang	tinggi	
jenis kelamin	laki-laki	Count	2	9	14	25
		% of Total	5.3%	23.7%	36.8%	65.8%
	perempuan	Count	0	5	8	13
		% of Total	.0%	13.2%	21.1%	34.2%
Total		Count	2	14	22	38
		% of Total	5.3%	36.8%	57.9%	100.0%

Tabel 7 menggambarkan persepsi tentang kontrol administrasi internal menurut jenis kelamin. Secara total, persepsi kontrol administrasi internal dalam kategori tinggi dinyatakan oleh sebanyak 57,9%, kategori sedang dinyatakan oleh 36,8%, dan kategori rendah dinyatakan oleh 5,3%. Kelompok laki-laki (36,8%) menyatakan kontrol administrasi internal dilakukan dalam kategori tinggi, sedangkan kelompok perempuan sebesar 21,1%. Dalam kategori sedang, laki-laki sebesar 23,7% dan perempuan sebanyak 13,2%. Sedangkan kategori kontrol administrasi rendah dinyatakan oleh laki-laki, yakni sebesar 5,3%.

Tabel 8: Tabel Silang Usia dan Kontrol Administratif Intern

usia * kontrol adminstrasi Crosstabulation						
			kontrol adminstrasi			Total
			rendah	sedang	tinggi	
usia	usia 20-30 th	Count	0	1	0	1
		% of Total	.0%	2.6%	.0%	2.6%
	usia 31-40 th	Count	0	2	6	8
		% of Total	.0%	5.3%	15.8%	21.1%
	usia 41-50 th	Count	0	6	16	22
		% of Total	.0%	15.8%	42.1%	57.9%

	% of Total	.0%	15.8%	42.1%	57.9%
usia 51 ke atas	Count	2	5	0	7
	% of Total	5.3%	13.2%	.0%	18.4%
Total	Count	2	14	22	38
	% of Total	5.3%	36.8%	57.9%	100.0%

Tabel 8 menggambarkan persepsi tentang kontrol administrasi internal berdasarkan usia. Total yang menyatakan kontrol administrasi internal dalam kategori tinggi dinyatakan oleh mayoritas responden, yakni sebanyak 57,9%, kategori sedang dinyatakan oleh 36,8% dan kategori rendah dinyatakan oleh 5,3%. Menurut usia 41-50 tahun, kontrol administrasi internal dilakukan dalam kategori tinggi (42,1%) dan sebesar 15,8% oleh kelompok usia 31-40 tahun.

Tabel 9: Persepsi Kontrol administrasi internal berdasarkan kelompok pendidikan

pendidikan * kontrol adminstrasi Crosstabulation						
			kontrol adminstrasi			Total
			rendah	sedang	tinggi	
pendidikan	sma	Count	2	4	2	8
		% of Total	5.3%	10.5%	5.3%	21.1%
	S1	Count	0	7	14	21
		% of Total	.0%	18.4%	36.8%	55.3%
	S2	Count	0	3	6	9
		% of Total	.0%	7.9%	15.8%	23.7%
Total	Count	2	14	22	38	
	% of Total	5.3%	36.8%	57.9%	100.0%	

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 57,9% responden menyatakan kontrol administrasi dilaksanakan dalam kategori tinggi. Persepsi kontrol administrasi dalam kategori tinggi paling banyak dinyatakan oleh kelompok berpendidikan Sarjana S1, yakni sebesar 36,8%, disusuk oleh kelompok berpendidikan S2 (15,8%) dan kelompok berpendidikan SMA sebanyak 5,3%. Sedangkan yang menyatakan kontrol administrasi internal berada pada kategori sedang adalah kelompok berpendidikan Sarjana S1 sebanyak 18,1%, berpendidikan SMA sebanyak 10,5%, dan berpendidikan S2 sebanyak 7,9%. Sedangkan kategori rendah dinyatakan oleh kelompok berpendidikan SMA (5,3%).

Tabel 10: Tabel Silang Peranan dalam Kelmompok dan Kontrol Administratif Intern

kelompok * kontrol adminstrasi Crosstabulation					
			kontrol adminstrasi		
			rendah	sedang	tinggi
kelompok	partai politik	Count	0	2	6
					8

	% of Total	.0%	5.3%	15.8%	21.1%
anggota Dewan	Count	0	6	4	10
	% of Total	.0%	15.8%	10.5%	26.3%
tokoh masyarakat	Count	2	5	1	8
	% of Total	5.3%	13.2%	2.6%	21.1%
eksekutif	Count	0	1	11	12
	% of Total	.0%	2.6%	28.9%	31.6%
Total	Count	2	14	22	38
	% of Total	5.3%	36.8%	57.9%	100.0%

Tabel 10 menggambarkan persepsi kontrol administrasi internal berdasarkan status dalam kelompok. Persepsi kontrol administrasi internal dalam kategori tinggi dinyatakan oleh 57,9% responden, sedang dinyatakan oleh sebanyak 36,8%, dan rendah dinyatakan oleh sebanyak 5,3%. Kelompok eksekutif (28,9%) menyatakan dalam kategori tinggi, 2,6 % menyatakan dalam kategori sedang, dan tidak ada yang menyatakan dalam kategori rendah. Kelompok partai politik sebanyak 15,8% menyatakan kontrol administrasi internal dalam kategori tinggi, kategori sedang dinyatakan oleh 5,3% dan tidak ada yang menyatakan dalam kategori rendah. Anggota DPRD menyatakan kontrol administrasi internal dalam kategori tinggi dinyatakan oleh sebanyak 10,5%, kategori sedang dinyatakan oleh sebanyak 15,8% dan tidak ada yang menyatakan dalam kategori rendah. Sedangkan tokoh masyarakat yang menyatakan kontrol administrasi dalam kategori tinggi sebanyak 2,6%, kategori sedang sebanyak 13,2% dan kategori rendah dinyatakan oleh sebanyak 5,3%. Gambaran selengkapnya mengenai persepsi tentang kontrol administrasi internal berdasarkan status dalam kelompok masyarakat dapat dilihat pada Tabel 10.

c. Media dan Opini Publik

Tabel 11: Tabel Silang Jenis Kelamin dan Peran Media dan Opini Publik

jenis kelamin * media dan opini Crosstabulation						
			media dan opini			Total
			rendah	sedang	tinggi	
jenis kelamin	laki-laki	Count	2	3	20	25
		% of Total	5.3%	7.9%	52.6%	65.8%
	perempuan	Count	0	3	10	13
		% of Total	.0%	7.9%	26.3%	34.2%
Total		Count	2	6	30	38
		% of Total	5.3%	15.8%	78.9%	100.0%

Persepsi tentang peranan media massa dan opini publik berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 11. Persepsi tentang peranan media massa dan opini publik dalam melihat akuntabilitas penyusunan anggaran dinyatakan dalam kategori tinggi sebanyak 78,9%, sedang dinyatakan oleh 15,8%, dan rendah oleh sebanyak 5,3%. Kelompok laki-laki(52,6%) menyatakan peran media dan opini publik berada pada kategori tinggi, 7,9% berada pada kategori sedang, dan 5,3% berada pada kategori rendah. Sedangkan kelompok perempuan (26,3%) menyatakan dalam kategori tinggi, 7,9% berada pada kategori sedang dan tidak ada yang menyatakan pada kategori rendah.

Tabel 12: Tabel Silang Usia dan Peran Media dan Opini Publik

usia * media dan opini Crosstabulation						
			media dan opini			Total
			rendah	sedang	tinggi	
usia	usia 20-30 th	Count	0	1	0	1
		% of Total	.0%	2.6%	.0%	2.6%
	usia 31-40 th	Count	0	1	7	8
		% of Total	.0%	2.6%	18.4%	21.1%
	usia 41-50 th	Count	0	1	21	22
		% of Total	.0%	2.6%	55.3%	57.9%
	usia 51 ke atas	Count	2	3	2	7
		% of Total	5.3%	7.9%	5.3%	18.4%
Total	Count	2	6	30	38	
	% of Total	5.3%	15.8%	78.9%	100.0%	

Persepsi tentang kontrol administrasi internal berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 12. Mayoritas responden menyatakan kontrol administrasi dilakukan dalam kategori tinggi , yakni sebanyak 78,9%, kategori sedang dinyatakan oleh 15,8%, dan kategori rendah dinyatakan oleh 5,3%. Responden yang paling banyak menyatakan kontrol administrasi internal berada pada kategori tinggi adalah kelompok usia 41-50 tahun (55,3%). Sedangkan kelompok usia 20-30 tahun tidak ada yang menyatakan kategori tinggi. Sedangkan kategori sedang dinyatakan oleh kelompok usia 51 tahun ke atas, yakni sebesar 7,9%, dan kelompok usia lainnya masing-masing sebesar 2,6%. Sedangkan kategori rendah hanya dinyatakan oleh kelompok usia 51 tahun ke atas, yakni sebesar 5,3%.

Tabel 13: Tabel Silang Tingkat Pendidikan dan Peran Media dan Opini Publik

pendidikan * media dan opini Crosstabulation		
		Total
media dan opini		

			rendah	sedang	tinggi	
pendidikan	sma	Count	2	2	4	8
		% of Total	5.3%	5.3%	10.5%	21.1%
	S1	Count	0	1	20	21
		% of Total	.0%	2.6%	52.6%	55.3%
	S2	Count	0	3	6	9
		% of Total	.0%	7.9%	15.8%	23.7%
Total		Count	2	6	30	38
		% of Total	5.3%	15.8%	78.9%	100.0%

Persepsi tentang peranan media berdasarkan pendidikan digambarkan oleh Tabel 13. Media dan opini publik mempunyai peranan dalam kategori tinggi dinyatakan oleh 78,9% responden, kategori sedang oleh 15,8%, dan rendah oleh 5,3%. Mayoritas responden yang berpendidikan Sarjana S1 menyatakan media dan opini publik berada pada kategori tinggi, yang berpendidikan S2 dinyatakan oleh 15,8% dan yang tamat SMA menyatakan dalam persepsi tinggi oleh sebanyak 10,5%.

Tabel 14: Tabel Silang Peranan dalam Kelompok dan Peran Media dan Opini Publik

kelompok * media dan opini Crosstabulation						
			media dan opini			Total
			rendah	sedang	tinggi	
kelompok	partai politik	Count	0	1	7	8
		% of Total	.0%	2.6%	18.4%	21.1%
	anggota Dewan	Count	0	2	8	10
		% of Total	.0%	5.3%	21.1%	26.3%
	tokoh masyarakat	Count	2	3	3	8
		% of Total	5.3%	7.9%	7.9%	21.1%
	ekeskutif	Count	0	0	12	12
		% of Total	.0%	.0%	31.6%	31.6%
Total	Count	2	6	30	38	
	% of Total	5.3%	15.8%	78.9%	100.0%	

Tabel 14 menggambarkan persepsi mengenai peranan media dan opini publik berdasarkan status dalam kelompok. Tingginya peran media dan opini publik dalam menegakkan akuntabilitas publik ditunjukkan oleh pendapat mayoritas, yakni sebesar 78,9%. Sedangkan yang menyatakan dalam kategori sedang sebanyak 15,8%, dan kategori rendah sebanyak 5,3%. Kategori tingginya peran media dan opini publik dinyatakan oleh kelompok eksekutif (31,6%), anggota DPRD (21,1%), partai politik (18,4%), dan tokoh masyarakat sebesar 7,9%. Kategori sedang dinyatakan oleh tokoh masyarakat sebesar 7,9%, anggota DPRD (5,3%), dan kelompok partai politik (2,6%). Sedangkan kategori rendah dinyatakan oleh kelompok tokoh masyarakat, yakni sebesar 5,3%.

d. Kualitas Akuntabilitas

Berikut adalah uraian tentang persepsi kualitas akuntabilitas berdasarkan kelompok jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan peran dalam struktur politik.

Tabel 15: Tabel Silang Jenis Kelamin dan Kualitas Akuntabilitas

jenis kelamin * kualitas akuntabilitas Crosstabulation						
			kualitas akuntabilitas			Total
			kurang baik	baik	sangat baik	
jenis kelamin	laki-laki	Count	3	1	21	25
		% of Total	7.9%	2.6%	55.3%	65.8%
	perempuan	Count	0	2	11	13
		% of Total	.0%	5.3%	28.9%	34.2%
Total		Count	3	3	32	38
		% of Total	7.9%	7.9%	84.2%	100.0%

Tabel 15 menggambarkan penilaian tentang kualitas akuntabilitas di Kota Depok. Sebanyak 84,2% menyatakan kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dinyatakan dalam kategori sangat baik, 7,9% menyatakan dalam kategori sedang dan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada 7,9% yang menyatakan kurang baik.

Tabel 16: Tabel Silang Usia dan Kualitas Akuntabilitas

usia * kualitas akuntabilitas Crosstabulation						
			kualitas akuntabilitas			Total
			kurang baik	baik	sangat baik	
usia	usia 20-30 th	Count	0	1	0	1
		% of Total	.0%	2.6%	.0%	2.6%

usia 31-40 th	Count	1	0	7	8
	% of Total	2.6%	.0%	18.4%	21.1%
usia 41-50 th	Count	0	2	20	22
	% of Total	.0%	5.3%	52.6%	57.9%
usia 51 ke atas	Count	2	0	5	7
	% of Total	5.3%	.0%	13.2%	18.4%
Total	Count	3	3	32	38
	% of Total	7.9%	7.9%	84.2%	100.0%

Kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah dinyatakan oleh 84,2% dalam kategori sangat baik dan 7,9% masing-masing dalam kategori baik dan kurang baik. Kualitas akuntabilitas dalam kategori sangat baik dinyatakan oleh mayoritas kelompok usia 41-50 tahun (52,6%) , kelompok usia 31-40 tahun (18,4%), kelompok usia 51 tahun ke atas sebanyak 13,2%. Sedangkan kategori kurang baik dinyatakan oleh 5,3% pada kelompok usia 51 tahun ke atas. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 17: Tabel Silang Tingkat Pendidikan dan Kualitas Akuntabilitas

pendidikan * kualitas akuntabilitas Crosstabulation						
			kualitas akuntabilitas			Total
			kurang baik	baik	sangat baik	
pendidikan	sma	Count	3	2	3	8
		% of Total	7.9%	5.3%	7.9%	21.1%
	S1	Count	0	0	21	21
		% of Total	.0%	.0%	55.3%	55.3%
	S2	Count	0	1	8	9
		% of Total	.0%	2.6%	21.1%	23.7%
Total	Count	3	3	32	38	
	% of Total	7.9%	7.9%	84.2%	100.0%	

Persepsi tentang kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah dinyatakan berada dalam kategori sangat baik dinyatakan oleh 55,3% oleh kelompok yang berpendidikan S1, 21,1% oleh yang berpendidikan S2, dan 7,9% oleh yang berpendidikan SMA. Sedangkan persepsi dalam kategori kurang baik dinyatakan oleh 7,9 yang berpendidikan SMA. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 18: Tabel Silang Peranan Kelompok dan Kualitas Akuntabilitas

kelompok * kualitas akuntabilitas Crosstabulation						
			kualitas akuntabilitas			Total
			kurang baik	baik	sangat baik	
kelompok	partai politik	Count	0	0	8	8
		% of Total	.0%	.0%	21.1%	21.1%
	anggota Dewan	Count	0	0	10	10
		% of Total	.0%	.0%	26.3%	26.3%

tokoh masyarakat	Count	3	3	2	8
	% of Total	7.9%	7.9%	5.3%	21.1%
eksekutif	Count	0	0	12	12
	% of Total	.0%	.0%	31.6%	31.6%
Total	Count	3	3	32	38
	% of Total	7.9%	7.9%	84.2%	100.0%

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat persepsi kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah berdasarkan pengelompokan peran dalam struktur politik, yakni kelompok partai politik, anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan eksekutif. Persepsi dalam kategori sangat baik dinyatakan oleh 31,6% dari kelompok eksekutif, 26,1% dari kelompok anggota DPRD, 21,1% dari kelompok partai politik, dan 5,3% dari tokoh masyarakat. Sedangkan persepsi kurang baik dinyatakan oleh 7,9% dari kelompok tokoh masyarakat.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas dalam Perumusan Anggaran Daerah di Kota Depok

Uraian berikut menjelaskan pengaruh faktor kontrol legislatif, kontrol administrasi internal, dan peran media-opini publik terhadap kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah di Kota Depok. Uraian meliputi analisis berdasarkan tabel silang, uji Chi Square, dan Sommers'd dari masing-masing faktor terhadap kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah di Kota Depok.

Tabel 19: Tabel Silang Kontrol Legislatif dan Kualitas Akuntabilitas

Crosstab						
			kualitas akuntabilitas			Total
			tidak baik	cukup baik	baik	
kontrol legislatif	tidak baik	Count	3	0	1	4
		% within kontrol legislatif	75.0%	.0%	25.0%	100.0%
	cukup baik	Count	0	3	3	6
		% within kontrol legislatif	.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	baik	Count	0	0	28	28
		% within kontrol legislatif	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Total	Count	3	3	32	38	
	% within kontrol legislatif	7.9%	7.9%	84.2%	100.0%	

Berdasarkan Tabel 19 dapat dideskripsikan bahwa jika kontrol legislatif dilaksanakan dengan tidak baik (kontrol yang rendah), maka kualitas akuntabilitas juga menunjukkan hasil yang rendah (75% yang menyatakan). Demikian juga jika kontrol legislatif dilaksanakan sedang-sedang saja (kategori cukup baik), maka kualitas akuntabilitas juga cenderung sedang-sedang saja. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh fakta bahwa jika kontrol legislatif dilaksanakan dengan kategori sangat baik (tinggi), maka hasil akuntabilitas juga menunjukkan baik. Berdasarkan analisis tabel silang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kontrol legislatif mempunyai hubungan positif terhadap kualitas akuntabilitas. Untuk memperkuat ada tidaknya hubungan, maka dilakukan Uji Chi Square, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20: Uji Chi Square Terhadap Variabel Kontrol Legislatif

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	44.828 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	28.650	4	.000
Linear-by-Linear Association	23.307	1	.000
N of Valid Cases	38		

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32.

Hasil pengujian Chi Square menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($0,00 < 1$). Hal ini mempunyai makna bahwa variabel kontrol legislatif mempunyai hubungan terhadap kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran di Kota Depok. Namun untuk lebih meyakinkan seberapa kuatnya besar hubungan tersebut dilaksanakan uji dengan Sommers'd. Tabel 21 menunjukkan hasil uji Sommers'd.

Tabel 21: Uji Sommers'd Terhadap Variabel Kontrol Legislatif

Directional Measures			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.725	.109	3.014	.003
		kontrol legislatif Dependent	.910	.055	3.014	.003
		kualitas akuntabilitas Dependent	.602	.156	3.014	.003

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Berdasarkan Tabel 21 dapat dilihat kekuatan hubungan antara variabel kontrol legislatif dengan kualitas akuntabilitas. Hasil uji memperlihatkan nilai Uji Sommer'd menunjukkan angka 0,602 atau mendekati angka 1. Hasil uji tersebut mempunyai makna hubungan tersebut cenderung kuat.

Berdasarkan analisa tabel silang, Uji Chi Square, dan Sommer'd dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kontrol legislatif dengan kualitas akuntabilitas pada kasus penyusunan anggaran di Kota Depok.

Tabel 22: Tabel Silang Kontrol Administratif Internal dan Kualitas Akuntabilitas

Crosstab						
			kualitas akuntabilitas			Total
			tidak baik	cukup baik	baik	
kontrol adminstrasi	tidak baik	Count	2	0	0	2
		% within kontrol adminstrasi	100.0%	.0%	.0%	100.0%
	cukup baik	Count	1	2	11	14
		% within kontrol adminstrasi	7.1%	14.3%	78.6%	100.0%
	baik	Count	0	1	21	22
		% within kontrol adminstrasi	.0%	4.5%	95.5%	100.0%
Total	Count	3	3	32	38	
	% within kontrol adminstrasi	7.9%	7.9%	84.2%	100.0%	

Berdasarkan Tabel 22 dapat dideskripsikan bahwa jika kontrol administrasi internal dilaksanakan dengan tidak baik (kontrol yang rendah), maka kualitas akuntabilitas juga menunjukkan hasil yang rendah (dinyatakan oleh 100% responden). Demikian juga jika kontrol administrasi internal dilaksanakan sedang-sedang saja (kategori cukup baik), maka kualitas akuntabilitas juga cenderung sedang-sedang saja. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh fakta bahwa jika kontrol administrasi internal dilaksanakan dengan kategori sangat baik (tinggi), maka hasil akuntabilitas juga menunjukkan baik. Berdasarkan analisis tabel silang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kontrol legislatif mempunyai hubungan positif terhadap kualitas akuntabilitas. Untuk memperkuat ada tidaknya hubungan, maka dilakukan Uji Chi Square, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 23: Uji Chi Square Kontrol Administratif Internal dan Kualitas Akuntabilitas

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	26.500 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	14.963	4	.005
Linear-by-Linear Association	12.774	1	.000
N of Valid Cases	38		

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16.

Hasil pengujian Chi Square kontrol administrasi internal terhadap kualitas akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($0,00 < 1$). Hal ini mempunyai makna bahwa variabel kontrol administrasi internal mempunyai hubungan terhadap kualitas akuntabilitas dalam

penyusunan anggaran di Kota Depok. Namun untuk lebih meyakinkan seberapa kuatnya besar hubungan tersebut dilaksanakan uji dengan Sommers'd. Tabel 21 menunjukkan hasil uji Sommers'd

Tabel 24: Uji Chi Square terhadap Kontrol Administratif Internal dan Kualitas Akuntabilitas

Directional Measures			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.423	.137	2.246	.025
		kontrol administrasi Dependent	.612	.183	2.246	.025
		kualitas akuntabilitas Dependent	.324	.130	2.246	.025

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Berdasarkan Tabel 24 dapat dilihat kekuatan hubungan antara variabel kontrol administrasi internal dengan kualitas akuntabilitas. Hasil uji memperlihatkan nilai Uji Sommer'd menunjukkan angka 0,324 atau mendekati angka 1. Hasil uji tersebut mempunyai makna hubungan sebesar 0,302, namun tidak sekuat hubungan kontrol administrasi internal dengan kualitas akuntabilitas..

Berdasarkan analisa tabel silang, Uji Chi Square, dan Sommer'd dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kontrol legislatif dengan kualitas akuntabilitas pada kasus penyusunan anggaran di Kota Depok.

Tabel 25: Tabel Silang Pengaruh Media dan Opini Publik dan dan Kualitas Akuntabilitas

Crosstab						
			kualitas akuntabilitas			Total
			tidak baik	cukup baik	baik	
media dan opini	tidak baik	Count	2	0	0	2
		% within media dan opini	100.0%	.0%	.0%	100.0%
	cukup baik	Count	1	2	3	6
		% within media dan opini	16.7%	33.3%	50.0%	100.0%
	baik	Count	0	1	29	30
		% within media dan opini	.0%	3.3%	96.7%	100.0%
Total	Count	3	3	32	38	
	% within media dan opini	7.9%	7.9%	84.2%	100.0%	

Berdasarkan Tabel 25 dapat dideskripsikan bahwa jika media dan opini publik mempunyai peranan yang rendah, maka kualitas akuntabilitas juga menunjukkan hasil yang rendah (dinyatakan oleh 100% responden). Demikian juga jika peranan media dan opini publik dilaksanakan sedang-sedang saja (kategori cukup baik), maka kualitas akuntabilitas juga cenderung sedang-sedang saja (dinyatakan oleh 33,3%). Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh fakta bahwa jika peranan media dan opini publik dilaksanakan dengan kategori sangat baik (tinggi), maka hasil akuntabilitas juga menunjukkan baik (dinyatakan oleh 96,7% responden). Berdasarkan analisis tabel silang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kontrol legislatif mempunyai hubungan kuat terhadap kualitas akuntabilitas. Untuk memperkuat ada tidaknya hubungan, maka dilakukan Uji Chi Square, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26: Uji Chi Square terhadap Pengaruh Media dan Opini Publik dan dan Kualitas Akuntabilitas

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	33.382 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	20.561	4	.000
Linear-by-Linear Association	23.462	1	.000
N of Valid Cases	38		

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16.

Hasil pengujian Chi Square peranan media massa dan opini publik terhadap kualitas akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($0,00 < 1$). Hal ini mempunyai makna bahwa variabel peranan media dan opini publik mempunyai hubungan terhadap kualitas akuntabilitas dalam penyusunan anggaran di Kota Depok. Namun untuk lebih meyakinkan seberapa kuatnya besar hubungan tersebut dilaksanakan uji dengan Sommers'd. Tabel 27 menunjukkan hasil uji Sommers'd

Tabel 27: Uji Sommers'd terhadap Pengaruh Media dan Opini Publik dan dan Kualitas Akuntabilitas

Directional Measures				
	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.684	.140	2.631	.009
		media dan opini Dependent	.771	.153	2.631	.009
		kualitas akuntabilitas Dependent	.615	.167	2.631	.009

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Berdasarkan Tabel 27 dapat dilihat kekuatan hubungan antara variabel peranan media dan opini publik dengan kualitas akuntabilitas. Hasil uji memperlihatkan nilai Uji Sommer'd menunjukkan angka 0,615 atau mendekati angka 1. Hasil uji tersebut mempunyai makna hubungan sebesar 0,615, di mana pada kasus ini variabel tersebut mempunyai hubungan paling kuat dengan kualitas akuntabilitas. Berdasarkan analisa tabel silang, Uji Chi Square, dan Sommer'd dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel peranan media dan opini publik dengan kualitas akuntabilitas pada kasus penyusunan anggaran di Kota Depok.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Dalam kasus ini, faktor kontrol legislatif, kontrol administrasi internal, dan media massa/opini publik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas akuntabilitas, yang ditunjukkan oleh kecenderungan dalam Tabel Silang dan Uji Chi Square (nilai uji < dari 0,05)
- Kekuatan hubungan antara variabel kontrol legislatif ditunjukkan dengan uji Sommer'd, yakni sebesar 0,602
- Hubungan antara variabel kontrol administrasi internal terhadap kualitas akuntabilitas ditunjukkan dengan uji Sommer'd, yakni sebesar 0,324.

- Hubungan antara variabel peran media dan opini publik terhadap kualitas akuntabilitas ditunjukkan dengan uji Sommer”d, yakni sebesar 0,615
- Teori akuntabilitas dapat diterapkan pada kasus di Depok dengan signifikansi sebesar 0,01

B. Rekomendasi

- Untuk memperkuat teori, penarikan sampel perlu diperbesar
- Perlu uji variabel yang lain, seperti partisipasi masyarakat dan derajat otonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aisyah, Siti. 2009. *Kinerja Badan Perwakilan Lokal pada Era Reformasi*. Jurnal Organisasi & Manajemen, Vol 5 No. 2 September 2009
- Aisyah, Siti. 2010. Implementasi Konsep Akuntabilitas Politik Di Tingkat Lokal (Kasus: Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok): Jurnal Jurnal Pamong Praja, ISSN. 1829-8478 Edisi 17-2010
- Budiardjo, M. (1983). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- Martini, Rina dan Fitriyah. *Sosiologi Pemerintahan*. Tangerang. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. 2010
- Haris, Syamsuddin. (Ed). 2002. *Akuntabilitas dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI
- Kumorotomo, Wahtudi. (2002). *Akuntabilitas Birokrasi Publik. Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Kerjasama antara Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar.

- Muhadjir, Darwin. 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Muttalib, & Mohd. Akbar Ali Khan. (1981). *Theory of local government*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Peter, B. Guys. The Politics of Bureaucracy. 1995. *An Introduction to Comparative Public Administration*. New York: Routledge.
- Polidano, C. 1998. "Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies." *Public Policy and Administration* 13, No. 1, Spring 1998.
- Prasodjo, E. (2007). *Pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Romli, L. (Ed). (2002). *Dinamika lembaga perwakilan lokal. Studi tentang peranan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1985
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN



KUESIONER
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penerapan Akuntabilitas
Publik Dalam Penyusunan Anggaran Daerah
Pada Pemerintahan Kota Depok

Yth. Bapak/Ibu/Saudara Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai seorang tenaga pengajar/dosen, kami diwajibkan untuk melakukan penelitian, khususnya penelitian menyangkut ilmu pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner berikut. Kami akan menjaga kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara, dimana tujuan penelitian ini hanya untuk keperluan ilmiah akademik FISIP Universitas Terbuka. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ketua Tim Peneliti

Dra. Siti Aisyah, M.Si

Dosen PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT/

Mahasiswa Program S3 Ilmu Pemerintahan IPDN

A. Informasi Umum

1. Nomor Responden :
2. Pekerjaan :
3. Jabatan :
4. Jenis Kelamin : 1= Laki-Laki; 2. Perempuan
5. Usia :
6. Pendidikan Terakhir : 1= Tidak Tamat SD
2= SD
3= SMP
4= SMA
5= Sarjana (S1)
6= Magister (S2)
7= Doktor (S3)

B. Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu jawaban yang paling mendekati perasaan dan keadaan Anda dengan cara mencontong tanda “V” pada kolom yang telah disediakan. Ada 4 pilihan yang tersedia.

Skor 4: Sangat Baik/Sangat Memuaskan/Sangat Sesuai/Sangat Paham

Skor 3: Baik/Memuaskan/Sesuai/Paham

Skor 2: Cukup Baik/Cukup Memuaskan/Cukup Sesuai/Cukup Paham

Skor 1: Tidak Baik/Tidak Memuaskan/Tidak Sesuai/Tidak Paham

C. Tanggapan/Persepsi/Perasaan Anda

Berilah tanda “V” pada kolom PERSEPSI sesuai persepsi/tanggapan/perasaan Anda

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI			
		1	2	3	4
KONTROL LEGISLATIF					
1	Kecukupan dan fungsi alat kelengkapan DPRD				
2	Pengetahuan anggota DPRD tentang tugas-tugas Komisi				
3	Intensitas diskusi dalam Fraksi dan Komisi				
4	Kualitas Diskusi Fraksi dan Komisi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat				
5	Responsivitas Fraksi dan Komisi terhadap kebutuhan masyarakat				
6	Keterbukaan Fraksi dan Komisi kepada masyarakat				
7	Tingkat Pendidikan Anggota DPRD				
8	Keseriusan Anggota DPRD terhadap isu-isu penting				
KONTROL ADMINISTRATIF INTERNAL		1	2	3	4

9	Terdapat kontrol yang dilakukan secara hirarkis oleh pejabat				
10	Penerapan aturan yang ketat bagi PNS dalam menjalankan fungsi				
11	Implementasi aturan menyangkut administratif dan finansial				
12	Sistem evaluasi kinerja pegawai birokrasi telah berjalan				
13	Pimpinan mempunyai peran dominan dalam melaksanakan kontrol administratif				
14	Hubungan antara pimpinan dan bawahan sesuai prosedur				
15	Sistem pelaporan finansial berjalan dengan baik				
MEDIA MASSA DAN OPINI PUBLIK		1	2	3	4
16	Kebebasan berekspresi dan berserikat diterima dan dihormati				
17	Kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi, dan asosiasi professional mempunyai kekuatan <i>bargaining</i> dalam pemerintahan				
18	Media mendukung transparansi terhadap kebijakan pemerintah				
19	Informasi yang dihasilkan pemerintah diakses secara luas oleh masyarakat				
20	Undang-undang tentang kebebasan informasi menguntungkan Masyarakat				
21	Masyarakat bersifat kritis terhadap pemerintah				
22	Pemerintah menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya				
23	Kesiapan sebagai warganegara untuk menjalankan hak dan kewajiban				
24	Penciptaan iklim yang kondusif oleh pemerintah kepada masyarakat untuk bersifat kritis				
25	Adanya kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap sifat kritis masyarakat kepada pemerintah				
KUALITAS PENERAPAN AKUNTABILITAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH		1	2	3	4
26	Anggaran daerah mencerminkan kebutuhan masyarakat				
27	Pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakat				
28	Penyusunan anggaran daerah berdasarkan masukan masyarakat				
29	Usulan anggaran daerah dapat diketahui masyarakat				
29	Masyarakat mempunyai ruang untuk mengakses penyusunan anggaran daerah				
30	Pemerintah menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat (melalui media massa, website dll)				
31	Pemerintah melakukan dengar pendapat dengan masyarakat sebelum menyusun anggaran daerah				
32	Anggota DPRD konsen terhadap kepentingan konstituennya				
33	Anggota DPRD menyerap dan menyampaikan aspirasi konsituennya dalam rapat penyusunan anggaran daerah				
34	Anggota DPRD menyampaikan program-program pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah kepada konstituennya				
35	Pemda konsen terhadap kepentingan masyarakat				
36	Pemda menyampaikan program-program pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah kepada masyarakat				

37	Pemerintah memanfaatkan potensi masyarakat daerah untuk pembangunan				
38	Pemerintah memanfaatkan potensi alam/daerah untuk kesejahteraan masyarakat				
39	Tersedia petunjuk teknis yang memadai dalam penyusunan anggaran daerah				
40	Perencanaan anggaran disusun sesuai kesepakatan				
41	Dalam kenyataannya, pemerintah membelanjakan untuk hal-hal yang kurang dibutuhkan masyarakat				
42	Pemerintah konsen terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan				
43	Pemerintah konsen terhadap upaya peningkatan pelayanan pendidikan				
44	APBD mencerminkan usaha pencapaian visi dan misi pemerintah daerah				
45	Visi dan misi pemerintah telah tercapai sesuai dengan harapan masyarakat				
46	Masyarakat diberi ruang menyampaikan <i>feedback</i> terkait kebijakan pemerintah daerah				

***Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengisi kuesioner ini.
Semoga kontribusi Anda bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.***

LAMPIRAN : DUKUNGAN SARANA PRASARANA

1. Dari Institusi yaitu Universitas Terbuka (perpustakaan, internet, surat tugas).
2. Masyarakat dan Pemerintah Kota Depok (LSM, website pemerintah kota tersedia, data dan informasi tersedia).
3. Laboratorium: tidak ada.
4. Peralatan Utama (komputer, laptop) : ada.

Lampiran : Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

No.	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian
1.	Dra. Siti Aisyah, M.Si	FISIP-UT	Ilmu Politik dan Pemerintahan	5 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Mengordinasikan kegiatan penelitian • Bersama anggota

					menyusun intrumnen penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Bersama-sama mengambil data • Bersama-sama mengolah dan menganalisa data penelitian • Bersama-sama menyusun laporan
2.	Yudith A Frans, S.Sos, MA	FISIP-UT	Administrasi Bisnis	5 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu dan melaksanakan penelitian • Bersama anggota menyusun intrumnen penelitian • Bersama-sama mengambil data • Bersama-sama mengolah dan menganalisa data penelitian • Bersama-sama menyusun laporan
3.	Ade Mariam	FISIP-UT	-	1 jam/minggu	Membantu keperluan adminstrasi dan laporan pertanggungjawaban dana penelitian

Lampiran Biodata Ketua Peneliti

Nama : Dra. SITI AISYAH, M.Si
 NIP/NIK : 19680612 199903 2 001
 Tempat dan Tanggal Lahir : Solo, 12 Juni 1968
 Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☒ Perempuan
 Status Perkawinan : ☒ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Duda/Janda
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : IIIId/Penata
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
 Alamat : Jl Cabe Raya Pondok Cabe
 Telp./Faks : (021) 7490941 Ext 1907
 Alamat Rumah : Vila Bogor Indah DD7/No.1 Ciparigi-Bogor
 Telp./Faks : 02518656966
 Alamat e-mail : aisyah@ut.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1991	Sarjana	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Pemerintahan
2005	Magister	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Politik

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
Tahun 1999	Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III angkatan V	Panitia Prajabatan	3 minggu
Tahun 1999	Pelatihan Akreditasi Tutor Universitas Terbuka (PATUT)	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2000	Pelatihan Penulisan Soal dan Analisis Item Butir Soal	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2000	Pelatihan pembuatan naskah tutorial berbasis komputer (CAI)	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2001	Pelatihan Program Power Point	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2002	Pelatihan Penulisan Naskah Radio dan TV	Universitas Terbuka	5 hari
Tahun 2003	Pelatihan Penelitian Kelembagaan	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2005	Pelatihan Penulisan artikel Majalah Komunika-UT	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2008	<i>Assistance In Designing & Planing A course In Instruksional Desain</i>	Universitas Terbuka	5 hari
Tahun 2009	Pelatihan TOEFL	Universitas Terbuka - ELS	3 bulan

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Sem/Tahun Akademik
Sistem Pemerintahan Indonesia	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	1999-2014
Sistem Pemerintahan Desa	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	1999- 2014
Pembangunan Politik	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	1999- 2014
Perubahan Sosial dan Pembangunan	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	1999- 2014
Pemerintahan Daerah	Strata 2	Magister Adm Publik	2005-2014
Pendidikan Kewarganegaraan	Strata 1	Ilmu Adm, Ilmu Komunikasi, dan Manajemen	2010-2014
Metodologi Penelitian Sosial	Strata 1	Ilmu Adm, Ilmu Komunikasi, dan Manajemen	2010-2014

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (Cetak dan NonCetak)	Semester/Tahun Akademik
Sistem Pemerintahan Indonesia	Strata 1	Cetak,BMP	2005
Hubungan Pusat Daerah	Strata 1	Cetak,BMP	2008
Sistem Pemerintahan Desa (Edisi 2)	Strata 1	Cetak,BMP	2012

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2006	Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perwakilan: Studi Kasus Di DPRD Kota Bogor 1999-2004	Ketua	Swadana
2006	Kelayakan Pengembangan Dan Implementasi Kit Tutorial Matakuliah IPEM4320 Siste Pemerintahan Indonesia Pada PS Ilmu Pemerintahan FISIP UT	Ketua	<i>Teaching Grant-TPSDP-Dikti</i>
2007	Dinamika Lembaga Legislatif Lokal Pada Era Reformasi (Studi Kasus: Kinerja DPRD Di Kota Bogor dan Depok)	Ketua	Universitas Terbuka
2008	Reorganisasi Lembaga Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung	Anggota	Universitas Terbuka
2009	Kinerja Badan Perwakilan Rakyat tingkat lokal pada Era Reformasi	Ketua	Universitas Terbuka
2009	Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia MK Sistem Pemerintahan Indonesia	Anggota	Universitas Terbuka
2009	Tracer Study UT	Anggota	Universitas Terbuka
2009	Akuntabilitas Pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok)	Anggota	Universitas Terbuka
2010	Pengembangan Masyarakat Perdesaan, Studi Kasus: Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah	Anggota	Universitas Terbuka
2010	Pengorganisasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	Anggota	Universitas Terbuka
2011	Fungsi Penganggaran Pada DPRD (Studi Kasus Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja DPRD Kota Tangerang Selatan)	Ketua	Universitas Terbuka
2011	Pendidikan Politik oleh Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Kesadaran Politik Masyarakat	Anggota	Universitas Terbuka
2011	Implementasi <i>e-govorment</i> dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah	Anggota	Universitas Terbuka
2012	Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh Matakuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu	Ketua	Universitas Terbuka
2012	Kualitas Layanan Distribusi Bmp Melalui Toko Buku Online Universitas Terbuka	Anggota	Universitas Terbuka
2012	Analisis Pola Layanan Pengaduan Masyarakat (Studi Kasus Unit Sentra Pelayanan Bagian Pelayanan Pengaduan Divisi Propam Mabes Polri)	Anggota	Universitas Terbuka

2013	Pengembangan Model Musrenbang Kecamatan Pada Perencanaan Pembangunan Di Kota Depok	Anggota	Hiber-Dikti
2013	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kota Depok	Ketua	PDP-Dikti

KARYA ILMIAH *

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2005	BMP Sistem Pemerintahan Indonesia	Universitas Terbuka
2008	BMP Hubungan Pusat dan Daerah (Tim)	Universitas Terbuka
2011	BMP Sistem Pemerintahan Desa (Edisi 2) Tim	Universitas Terbuka
Maret 2006	Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perwakilan: Studi Kasus Di DPRD Kota Bogor 1999-2004	Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol 2 No 1 Tahun 2006
September 2009	Reorganisasi Lembaga Perangkat Daerah Pemda Kota Bandung Menurut PP No 41 Tahun 2007	Jurnal Widya Praja Vol XXXV No. 3, ISSN 0216-4019
September 2009	Kinerja Badan Perwakilan Rakyat tingkat lokal pada Era Reformasi	Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5 No. 2 September 2009 ISSN 20859686
Juli 2010	Implementasi Konsep Akuntabilitas Politik di Daerah Pemilihan Kota Depok (Peratanggungjawaban Anggota DPRD Kepada Konstituen)	Jurnal Pamong Praja, ISSN. 1829-8478 Edisi 17-2010
Sept 2013	Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh Pada Matakuliah Sistem Kependidikan Dan Pemilu (Ipem4318)	Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh Vol; 17 No 2 Sept 2013, ISSN 1411-304X
Sept 2013	Peningkatan Peran Pemerintah Dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Dan Konservasi Lingkungan Di Dieng Plateau	Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol 2 Sept 2013-ISSN 20859686

*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/olahraga

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2006	Kelayakan Pengembangan KITS Tutorial Matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia	Dikti-TPSDP
2007	Dinamika Lembaga Legislatif Lokal pada Era Reformasi	LPPM UT
2008	Mencermati Fenomena Pemekaran Dalam Konteks Otonomi Daerah	FISIP-UT
2009	Pengimplementasian Akuntabilitas Dalam Konteks Otonomi Daerah	FISIP-UT
2009	Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia Matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia	FISIP-UT
2009	Akuntabilitas pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Studi Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok)	LPPM- UT
2010	Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (Studi Kasus	LPPM-UT

	Pengembangan Masyarakat Perdesaan)	
2011	Penguatan Modal Sosial: Upaya Mengatasi Pembangunan di Kawasan Dieng Plateau	FISIP-UT
2001	Peran UT Dalam Pembangunan SDM di Indonesia (Tracer Study UT)	ICDE
2011	The Role of Higher Institution in Developing Human Resources in Indonesia (A Tracer Study at Universitas Terbuka)	ICDE Conference 2012
2012	A Case Study on The Graduate's Readiness for Employment : A Tracer Study at Universitas Terbuka	Exlima Conference_UI 2012

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2013	Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Pantai Natsepa, Pulau Ambon	Jurnal Organisasi dan Manajemen Volume 9 Nomor 1 tahun 2013- ISSN 2085-9686

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/peserta/pembicara
2006	Seminar Nasional Teaching Grant 2006: Kelayakan Pengembangan Kits Tutorial Matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia	Dikti _TPSDP	Pembicara
2007	Seminar Penelitian : Dinamika Lembaga Legislatif Lokal pada Era Reformasi	UT	Pembicara
2008	Seminar Ilmiah: Mencermati Fenomena Pemekaran Dalam Konteks	UT	Pembicara
2008	Seminar : Sistem Jaminan Kualitas sebagai Sarana Membangun <i>World Class University</i>	UT	Peserta
2008	Seminar Nasional FISIP: Membangun Layanan Akademik yang Berkualitas antar Institusi Penyelenggaraan Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Melalui Pemanfaatan e-learning	UT	Peserta
2008	Diskusi dalam rangka Dies Natalis Tri Windu; Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Masyarakat sebagai Rujukan Pengembangan	UT	Peserta

	Substansi Kajian di Perguruan Tinggi		
2009	Seminar Ilmiah : Pengimplementasian Akuntabilitas Dalam Konteks Otonomi Daerah	UT	Pembicara
2009	Seminar Ilmiah: Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia Matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia	UT	Pembicara
2009	Seminar Ilmiah: Meraih Keunggulan UT Melalui Peningkatan Kualitas Penelitian, Karya Ilmiah dan Publikasi	UT	Pembicara
2009	Seminar Nasional FISIP-UT Dalam Rangka Lustrum-UT ke-5: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	UT	Peserta
2010	Seminar Ilmiah: Meningkatkan Budaya Akademik Melalui Peningkatan Kompetensi Pelatihan	UT	Pembicara
2010	Seminar Ilmiah Intern FISIP-UT	UT	Peserta
2011	Seminar Nasional FISIP-UT: Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani	UT	Panitia
2011	Seminar Ilmiah Intern FISIP-UT: Penguatan Modal Sosial: Upaya Mengatasi Pembangunan di Kawasan Dieng Plateau	UT	Pembicara

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2009	Penyuluhan tentang Peningkatan Motivasi	Kelurahan Karang Tengah, Kec. Gunung Puyuh Sukabumi
2010	Penyuluhan tentang Memanfaatkan Sampah Non Organik	Pondok Cabe, Tangerang Selatan

2011	Penyuluhan tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Cipanas Kabupaten Cianjur
2011	Melaksanakan Program Bantuan Sosial (Bansos) masyarakat Tangerang Selatan, Kel. Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir	Kel. Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Ketua Prodi ilmu Pemerintahan	Universitas Terbuka	Tahun 2006-2010
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan	Universitas Terbuka	Tahun 2010-2014

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Peran	Tempat
2011	Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa	Penilai	UT
2011	Temu Keakraban Pokjar Mahasiswa-Alumni UT: Menuju Pembelajaran Mandiri Yang Cerdas	Narasumber	Pokjar Pemda Kab. Tegal

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan
2010	Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia	Anggota
2011	Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)	Anggota

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

4.b. Biodata Anggota Peneliti

1. Nama : Yudith Alexanderina Frans
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 16 Juli 1979
3. Status Perkawinan : Kawin
4. Agama : Kristen Protestan
5. Alamat : Komplek Universitas Terbuka Blok D.8 Jabon Mekar, Parung – Bogor

A. Riwayat Pendidikan

- a. Sarjana (S1) Universitas Nusa Cendana Kupang, Lulus Tahun 2002

- b. Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia Jakarta, Lulus Tahun 2010

B. Kursus dan Pelatihan :

- a. Pelatihan Pengembangan Prototipe Soal TAP, Universitas Terbuka, 2010
- b. Pelatihan Akreditasi Tutor Universitas Terbuka, 2007
- c. *TOEFL Preparation Course*, ELS, 2006
- d. Pelatihan Penelitian Mula, Universitas Terbuka, 2005
- e. Pelatihan Editing dan Baca Cepat untuk Bahan Ajar UT, Universitas Terbuka, 2004
- f. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Terbuka, 2003

C. Riwayat Pekerjaan :

Dari Tahun 2002 s.d Tahun Sekarang Sebagai Staf Akademik FISIP Universitas Terbuka

D. Seminar :

- a. Peserta pada Seminar Internasional "*The Importance of Entrepreneurial Management Competences in Team Building for The Development of Business Growth*". 2011
- b. Peserta pada Seminar Nasional "Peran Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia", Universitas Terbuka, 2011
- c. Peserta pada Seminar Nasional "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Terbuka, 2009
- d. Peserta Seminar "Sistem Jaminan Kualitas Sebagai Sarana Membangun *World Class University*", 2008
- e. Peserta pada Diskusi Ilmiah "Perkembangan Ilmu, Teknologi, dan Masyarakat Sebagai Rujukan Pengembangan Substansi Kajian di Perguruan Tinggi, Universitas Terbuka, 2008
- f. Pemakalah pada Seminar Internasional "*Acceleration of Educational Quality and Quantity Through Provision of Open and Distance Learning Programs in South East Asian Countries*", Universitas Terbuka dan SEAMEO SEAMOLEC, 2008
- g. Pemakalah Seminar Intern FISIP-UT "Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penilaian Suatu Kontrak Asuransi", 2007

E. Karya Ilmiah:

- a. *Job Resources, Hope, dan Job Performance* Dosen Universitas Terbuka. Laporan Penelitian. LPPM-UT, 2011.
- b. *Technology and Higher Education: Do Female Students Face The Double Discrimination?* Poster Pada 24th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Nusa Dua 2-5 Okt' 2011
- c. Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang. Laporan Penelitian. LPPM-UT, 2010.
- d. *The Role of E-Learning in Improving The Quality of Local Goverment Apparatus in Public Services*. Makalah pada International Seminar "*Acceleration of Educational Quality and Quantity Through Provision of Open and Distance Learning Programs in South East Asian Countries*", Universitas Terbuka dan SEAMEO SEAMOLEC, 27 Agustus 2008
- e. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Laporan Penelitian, LPPM-UT, 2007
- f. Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus pada Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang), LPPM-UT, 2007

- g. Determinan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Depok), Laporan Penelitian, LPPM-UT, 2007
- h. Pengaruh Pengelolaan Tutor dan Faktor Internal Mahasiswa Terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Tutor, Laporan Penelitian, 2006
- i. Evaluasi Kesiapan Mahasiswa UPBJJ-UT Kupang Dalam Mengikuti Tutorial Elektronik, Bunga Rampai IV FISIP-UT, 2006
- j. Peranan Asuransi dalam Kehidupan dan Masyarakat, Bunga Rampai III FISIP-UT, 2006
- k. Evaluasi Bahan Ajar Buku Materi Pokok ADPU4442 Sistem Informasi Manajemen, Laporan Penelitian, 2006